

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp2.000 triliun, sedangkan untuk tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (www.depkop.go.id, diunduh 22 Agustus 2010).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. UMKM mampu bertahan dari beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang

bangkrut dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali.

Di banyak negara, UMKM memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UMKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten, 2006). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Zimele, 2009).

Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha serta masalah pemasaran produk kepada masyarakat. Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp20 triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Osa, 2010). Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target Rp20 triliun yakni hanya sebesar Rp14,8 triliun.

Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih terlalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006). Selain itu, permasalahan seperti kredit macet juga menjadi salah satu penyebab minimnya penyaluran kredit ke UMKM.

Selama ini keberpihakan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan mikro masih disamakan dengan usaha menengah besar atau korporasi, baik dari tingkat suku bunga maupun persyaratan yang ditetapkan terutama dalam masalah agunan. Selain itu juga karena belum adanya lembaga atau institusi penjamin kredit yang dapat menopang, baik formal maupun dari pemerintah daerah sendiri.

Dalam memberikan kredit, bank dituntut agar mendapat keuntungan yang pantas, sehingga cukup untuk menutupi seluruh biaya dana, baik dana yang ditempatkan pada sektor yang menghasilkan maupun dana yang tidak menghasilkan, biaya *overhead* dan biaya operasional lain, serta target margin keuntungan yang hendak dicapai. Dengan demikian pinjaman/kredit merupakan tulang punggung/mesin pencetak keuntungan bagi bank. Oleh karena keuntungan yang diperoleh dari penempatan dalam bentuk kredit adalah besar, maka risiko yang dihadapi juga besar, sehingga penempatan dalam pos ini paling banyak menimbulkan masalah dan banyak menyita tenaga, waktu, dan biaya. Agar risiko tersebut dapat

diminimalkan, maka bank melakukan serangkaian analisa untuk meyakinkan apakah calon nasabah itu layak diberikan kredit.

Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic* (Kasmir, 2004: 235). Dari kelima prinsip tersebut akan dilihat mana yang memiliki pengaruh paling besar. *Character* berkaitan dengan watak calon debitur. Lembaga keuangan mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. *Capacity* atau kapasitas usaha diukur dari lamanya usaha, dan kemampuan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya adalah faktor *capital* yang menunjukkan posisi finansial debitur secara keseluruhan. Bank atau lembaga keuangan harus mengetahui bagaimana perimbangan antara hutang dan jumlah modal sendiri calon debitur. *Collateral* adalah jaminan *condition of economics* menunjukkan keadaan perekonomian calon debitur yang terukur melalui pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Penelitian ini merujuk dari penelitian sebelumnya yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit mikro pada bank BTPN di Sumatera Utara. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara simultan variabel lama usaha, kapasitas usaha, karakter debitur, dan sektor ekonomi yang dibiayai berpengaruh terhadap keputusan kredit. Secara parsial variabel kapasitas usaha berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan kredit (Vida dkk, 2011). Penelitian lain yang juga menganalisis tentang keputusan kredit perbankan dilakukan oleh Siregar dan Rudiantoro (2011) besaran jaminan, jangka waktu kredit dan kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel lama usaha dan kualitas laporan keuangan tidak

berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit. Sedangkan untuk variabel kapasitas usaha memiliki hasil yang sama yaitu berpengaruh positif. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kembali mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan kredit perbankan khususnya kredit mikro dengan mengambil judul **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi kasus pada Bank Negara Indonesia)**. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan melihat variabel lama usaha, sistem pembukuan keuangan, jumlah jaminan, sektor ekonomi yang dibiayai dan karakteristik debitur sebagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan pemberian kredit mikro.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan?
2. Apakah sistem pembukuan yang digunakan berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan?
3. Apakah jumlah jaminan berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan?
4. Apakah sektor ekonomi yang dibiayai berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan?
5. Apakah karakteristik debitur berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama usaha terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pembukuan yang digunakan terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah jaminan terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor ekonomi terhadap keputusan pemberian kredit mikro perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada pihak perbankan faktor-faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan kredit.
2. Sebagai bahan masukan kepada debitur dan calon debitur mengenai faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan kredit.
3. Bagi penelitian berikutnya agar dapat menjadi masukan.